



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA 2022



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Jln. Fatmawati No. 9
Email : diknas_sly@yahoo.co.id
Website : diknas.kepulauanselayarkab.go.id
Kode POS : 92812

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan program tahunan, disusun dengan maksud sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran berjalan yang memuat keberhasilan yang telah dicapai dan tantangan serta Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang pendidikan.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan LAKIP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan dan/atau kelemahan, namun demikian kami menganggap bahwa semua kegiatan yang kami laksanakan mengarah kepada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Akhirnya segala bantuan dan sumbang saran dari berbagai pihak kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua.

Benteng, Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. MUSTAKIM KR, MM.Pd
Nip. : 196612311992031180
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	4
D. Isu – isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	28
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Rencana Kerja Tahunan	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Pengukuran Kinerja	42
B. Analisis Capaian Kinerja	54
C. Realisasi Keuangan	64
BAB III PENUTUP	68



A. Latar Belakang

Salah satu dasar keberhasilan tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari Akuntabilitas Daerah karena dari Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat

dipercaya (akurat) dan disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat. Dengan demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat. Dengan demikian dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, para pejabat dan

pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcomes) yang diperoleh.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD sesuai dengan misi dan visi kepala daerah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun dengan menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah (rasio) atau persentase yang bisa dijadikan bahan evaluasi selama 1 tahun anggaran untuk menentukan langkah/target ditahun berikutnya.

Oleh karena itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Mendorong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Menjadikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
4. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Urusan bidang pendidikan merupakan urusan konkuren atau urusan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan dimaksud sudah dibagi dengan jelas sesuai jenjang pemerintahan. Matriks pembagian sub

struktur pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti di bawah ini :

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	2	4	5
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan Standar Pendidikan Nasional b. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	a. Pengelolaan Pendidikan Menengah b. Pengelolaan Pendidikan Khusus	a. Pengelolaan Pendidikan Dasar b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
2	Kurikulum	Penetapan Kurikulum Nasional Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
3	Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	---	---
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian Formasi Pendidik, Pemindahan Pendidik, Pengembangan dan Peningkatan Karir Pendidik dan Pemindahan b. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Daerah/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemindahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan Izin Swasta yang diselenggarakan	a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan	a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

No	1	2	1	1
Sub Urusan	1. Kebijakan : Kepemudaan Bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional :	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
Pemerintah Pusat	a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.	a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.	a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.	a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.
Pemerintah Provinsi	4	3	4	5
Kabupaten/Kota				

Sedangkan untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga, sesuai peraturan pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti di bawah ini:

6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		b. Penerbitan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Asing oleh masyarakat.	b. Penerbitan izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	b. Penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

<p>d. Pengembangan sektoral, manajemen, wawasan dan kreativitas</p> <p>e. Kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (MTAQ) ketakwaan (MTAQ) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan Pengaturan sistem penganugerahan prestasi Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan jaringan dan system informasi Kriteria standarisasi lembaga kependudukan Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kependudukan Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif</p>	<p>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas</p> <p>e. Kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (MTAQ) ketakwaan (MTAQ) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan Pengaturan sistem penganugerahan prestasi Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan jaringan dan system informasi Kriteria dan standarisasi lembaga kependudukan Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kependudukan Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif</p>	<p>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas</p> <p>e. Kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (MTAQ) ketakwaan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan Pengaturan sistem penganugerahan prestasi Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan jaringan dan system informasi Kriteria dan standarisasi lembaga kependudukan Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kependudukan Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif</p>	<p>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas</p> <p>e. Kemitraan dan kewirausahaan</p> <p>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (MTAQ) ketakwaan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan Pengaturan sistem penganugerahan prestasi Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan jaringan dan system informasi Kriteria dan standarisasi lembaga kependudukan Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kependudukan Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif</p>
---	---	--	--

<p>2. Pelaksanaan</p>	<p>3. Koordinasi</p>
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kegiatan di bidang kepemudaan skala nasional :</p> <p>a. Aktivas kepemudaan yang berskala nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas provinsi</p> <p>c. Pembangunan pusat pembudayaan pemuda berskala nasional.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat nasional.</p> <p>e. Kerjasama antar provinsi dan internasional</p>	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan skala nasional :</p> <p>a. Koordinasi antar Departemen/Lemb aga Pemerintah Non Departemen (LPND)</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p>
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kegiatan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <p>a. Aktivas kepemudaan yang berskala kepemudaan lintas kabupaten/kota</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas</p> <p>c. Pembangunan pusat pembudayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi.</p> <p>e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional</p>	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah</p>
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kegiatan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :</p> <p>a. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan internasional dan internasional</p> <p>c. Pembangunan pusat pembudayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p>	<p>1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p>

			c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.	c. Koordinasi antara kecamatan skala kabupaten/kota
4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala nasional : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan, penyusunan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang	

		<p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan</p>	<p>kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>	<p>kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
<p>Olahraga:</p> <p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p>	

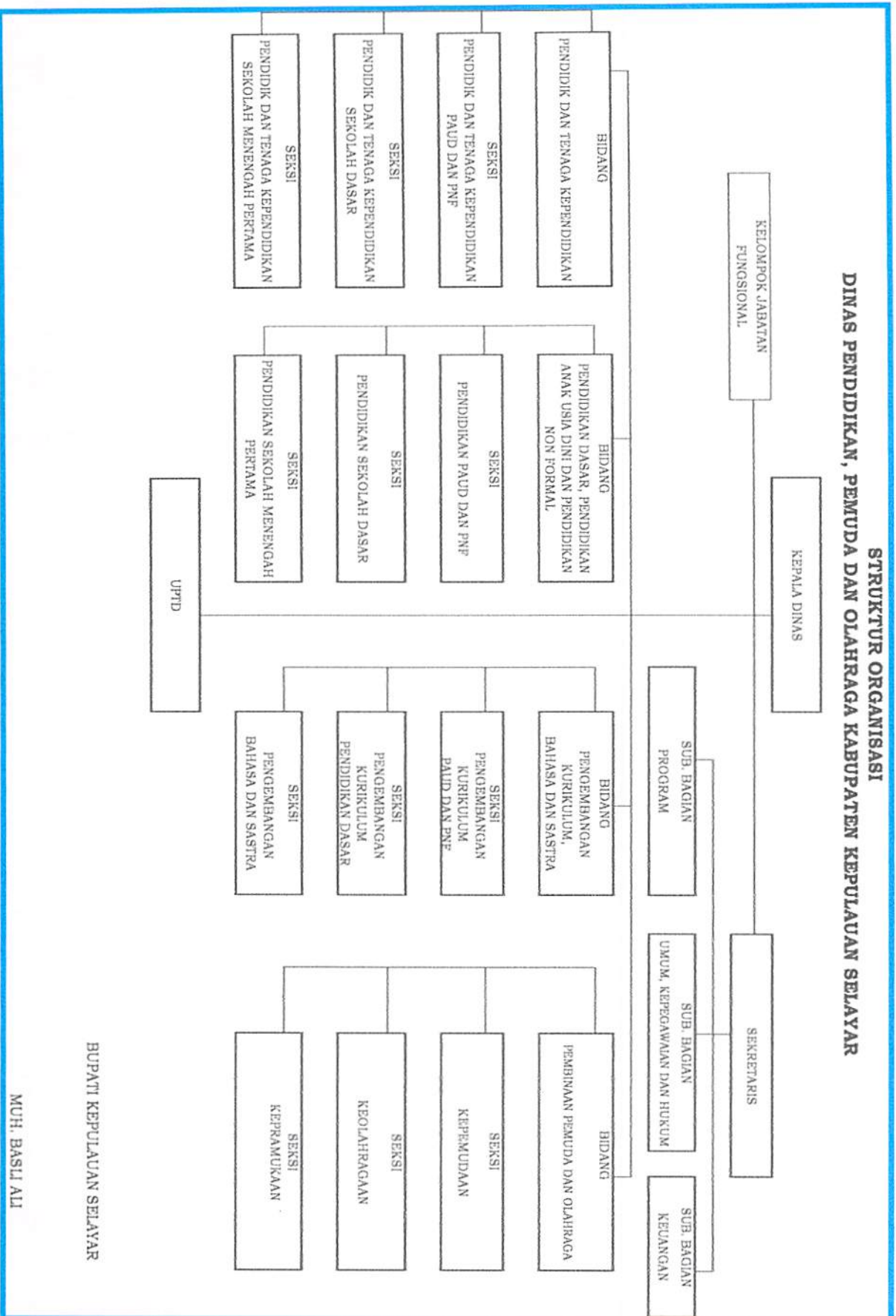
h. Pendanaan	keolahragaan.	keolahragaan.	keolahragaan.
i. Pengembangan	IPTEK	IPTEK	IPTEK
j. Pengembangan	keolahragaan.	keolahragaan.	keolahragaan.
j. Pengembangan	keolahragaan.	keolahragaan.	keolahragaan.
k. Pengembangan	keolahragaan.	keolahragaan.	keolahragaan.
k. Pengembangan	keolahragaan.	keolahragaan.	keolahragaan.
l. Peningkatan	peran serta	peran serta	peran serta
l. Peningkatan	bidang dan	bidang dan	bidang dan
l. Peningkatan	sektor serta	sektor serta	sektor serta
m. Pengembangan	manajemen	manajemen	manajemen
m. Pengembangan	manajemen	manajemen	manajemen
n. Kemitraan industri	dan	dan	dan
n. Kemitraan industri	kewirausahaan	kewirausahaan	kewirausahaan
o. Pengembangan	olahraga.	olahraga.	olahraga.
o. Pengembangan	olahraga.	olahraga.	olahraga.
p. Peningkatan	IPTEK olahraga.	IPTEK olahraga.	IPTEK olahraga.
p. Peningkatan	profesionalisme	profesionalisme	profesionalisme
p. Peningkatan	atih, pelatih,	atih, pelatih,	atih, pelatih,
p. Peningkatan	manager dan	manager dan	manager dan
q. Pembangunan	pembina	pembina	pembina
q. Pembangunan	olahraga.	olahraga.	olahraga.
q. Pembangunan	dan	dan	dan
q. Pembangunan	pengembangan	pengembangan	pengembangan
r. Pengaturan	industri olahraga.	industri olahraga.	industri olahraga.
r. Pengaturan	sistem	sistem	sistem
r. Pengaturan	pengaturan	pengaturan	pengaturan
r. Pengaturan	dan kesejahteraan	dan kesejahteraan	dan kesejahteraan

<p>2. Pelaksanaan</p>	
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional :</p> <p>a. Aktivitas keolahragaan skala nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan provinsi</p>	<p>x. Hubungan internasional di bidang keolahragaan.</p> <p>w. Pemberdayaan dan keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan, informasi jaringan dan sistem</p> <p>u. Pengembangan sarana olahraga, prasarana dan pembangunan</p> <p>t. Peningkatan dan keolahragaan.</p> <p>s. Pengaturan standarasi, sertfikat keolahragaan.</p>
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <p>a. Aktivitas keolahragaan nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas</p>	<p>x. — masyarakat jasmani kebugaran peningkatan olahraga serta pemasyarakatan dan</p> <p>w. Pemberdayaan keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan, sistem informasi jaringan dan</p> <p>u. Pengembangan sarana olahraga, prasarana dan pembangunan</p> <p>t. Peningkatan dan keolahragaan.</p> <p>s. Pengaturan pelaku olahraga, standarasi, sertfikat keolahragaan.</p>
<p>1. Pelaksanaan</p> <p>kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/ kota :</p> <p>a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional</p> <p>b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecematan</p>	<p>x. — masyarakat jasmani kebugaran peningkatan olahraga serta pemasyarakatan dan</p> <p>w. Pemberdayaan keolahragaan.</p> <p>v. Kriteria lembaga keolahragaan, sistem informasi jaringan dan</p> <p>u. Pengembangan sarana olahraga, prasarana dan pembangunan</p> <p>t. Peningkatan dan keolahragaan.</p> <p>s. Pengaturan standarasi, sertfikat keolahragaan.</p>

Berdasarkan peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 tahun 2020 tentang Keduukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut :

skala	kabupaten/kota			
c. Kerjasama antar kabupaten/kota, kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi pemerintah dan internasional	c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional	c. Kerjasama antar provinsi dan internasional		
d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pendanaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan	d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pendanaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan	d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga, pendanaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan		
e. Pendanaan keolahragaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan	e. Pendanaan keolahragaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan	e. Pendanaan keolahragaan dan peningkatan dan pelatihan keolahragaan		
f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan	f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan	f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan		
g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga	g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga	g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga		

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI

Dari bagan diatas dapat dijabarkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
6. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Kepramukaan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga keadaan 31 Desember 2022 sebanyak 2968 orang terdiri dari tenaga fungsional (Guru ASN dan Non ASN, Pengawas, Laboran, dan Pustakawan) serta non fungsional (Pejabat Struktural dan Staf). Komposisi dari jumlah tersebut terdapat 1 pejabat struktural setingkat eselon II/A (Kepala Dinas) dan 5 pejabat struktural setingkat eselon III/A termasuk Sekretaris dan Kepala Bidang dan 9 pejabat setingkat eselon IV/A, diantaranya 3 Kasubag dan 6 Kepala Seksi.

D. Isu-isu Strategis

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "***Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara***". Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memprioritaskan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan penerapannya melalui isu-isu strategis khususnya pada bidang pendidikan, antara lain :

1. Akses pendidikan yang merata pada seluruh lapisan masyarakat;
2. Infrastruktur dasar dan fasilitas pendidikan yang memadai;
3. Jumlah dan distribusi guru yang proporsional;
4. Pendidik yang tersertifikasi pada lembaga PAUD dan guru PAUD

yang memiliki kualifikasi S1/D-IV.

5. Buku mata pelajaran muatan lokal disekolah yang memadai
 6. Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan sastra daerah.
- Disamping hal-hal tersebut diatas beberapa isu strategis juga dimuat dalam setiap rencana kerja perangkat daerah adalah isu yang berhubungan dengan urusan pemuda dan olahraga, antara lain:
1. Optimalisasi peran dan fungsi organisasi pemuda
 2. Optimalisasi fasilitas, pendampingan dan peningkatan prestasi olahraga
 3. Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pelopor
 4. Sarana dan prasarana olahraga kabupaten yang memadai
 5. Pemberian reward atau penghargaan kepada atlet berprestasi
 6. Frekuensi penyelenggaraan festival dan olahraga rekreasi/wisata/ petualang.



A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021– 2026 disusun untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, strategi, kebijakan RPJMD 2022– 2026, melalui penyusunan program dan kegiatan. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu *“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*. Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.**
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.**
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
5. **Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.**
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2022 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-3, terkait dengan **tujuan ke-4** : meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia (T-4) dengan **sasaran ke-4**, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (S-4).

Misi ke-5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-5, terkait dengan **tujuan ke-5** : meningkatkan aktualisasi nilai budaya(T-5) dengan **sasaran ke-8**, yaitu meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-8).

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kewajibannya yang paling dominan adalah untuk mensukseskan misi-3 sasaran ke-4 (empat) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026 dalam hal *“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”* melalui kebijakan teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang menekankan pada tersedianya pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta meningkatnya

kesadaran untuk berolahraga, melalui peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi kinerja organisasi dalam rangka tercapainya misi visi Kepala Daerah

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) :			
1.1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Siswa usia 5 - 6 TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun}} \times 100\%$
1.2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	100	$\frac{\text{Jumlah Siswa usia pendidikan dasar 7-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 15 tahun}} \times 100\%$
1.3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100	$\frac{\text{Jumlah Siswa Kesetaraan usia 7-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 18 tahun}} \times 100\%$

2	Indeks Pendidikan :			
2.1	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	86,66	%	Jumlah siswa PAUD/RA X 100%
2.2	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	118	%	Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 thn X 100%
2.3	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	118	%	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn X 100%
2.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan	100	%	Dimana : $APt^h = \frac{E^h}{P^h_a} \times 100$ h = jenjang pendidikan t = tahun P^h_a = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t P^h = total jumlah penduduk pada tahun t
2.5	APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD/RA	100	%	Jumlah siswa usia 5-6 thn jenjang PAUD/RA X 100%
2.6	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	99	%	Jumlah siswa usia 7-12 thn jenjang SD/MI/Paket A X 100%
2.7	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	92,12	%	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn SMP/MTs/Paket B X 100%
2.8	AP (Angka Putus Sekolah) SD/MI	0,05	%	Jumlah seluruh APS SD/MI Se-Kabupaten X 100%
2.9	AP (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs	0,00	%	Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs Se-Kabupaten X 100%
2.10	AL (Angka Kelulusan) SD/MI	100	%	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI X 100%
2.11	AL (Angka Kelulusan) SMP/MTs	100	%	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya X 100%
2.12	AM (Angka Melanjutkan) SD/MI ke SMP/MTs	100	%	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs X 100%
2.13	Faciltas Pendidikan :			
	a. Bangunan SD kondisi baik	100	%	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik X 100%
	b. Bangunan SMP kondisi baik	100	%	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs bangunan baik X 100%
2.14	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata TK	1:10	Rasio	Jumlah guru sekolah (TK/RA) per kelas X 100

2.15	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SD	Rasio	1:20	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid sekolah dasar}} \times 100$
2.16	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SMP	Rasio	1:20	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah menengah pertama per kelas}}{\text{Jumlah murid sekolah menengah pertama}} \times 100$
2.17	Guru yang memenuhi kualifikasi DIV/S1	%	55	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs}} \times 100\%$
3	Kepemudaan dan Olahraga			
3.1	Jumlah Organisasi Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Pemuda	35	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
3.1	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Cabang	26	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$
3.2	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti	Kegiatan	6	Jumlah kegiatan olahraga yang diikuti tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
3.3	Jumlah Penghargaan Olahraga yang diperoleh	Medali	10	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
3.4	Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan	Kegiatan	2	Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan dalam satu tahun

C. Rencana Kerja Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2022 yang sudah tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 – 2026, maka telah disusun rencana kerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022. Rencana kerja yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran strategis dalam 2 (dua) urusan pemerintahan terdiri dari 66 (Enam Puluh Enam) Sub Kegiatan yang mendukung 6 (Enam) Program kegiatan untuk mencapai target dari indikator yang telah ditetapkan tahun 2022. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULUAN SELAYAR**

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN							
					1	2	3	5	8	9	10	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							
1					DASAR							
1					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN							
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.297.787,00	76.992.535,00	218.290.322,00				
1	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.138.000,00	-	26.138.000,00				
1	01	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.195.750,00	1.619.000,00	12.714.750,00				
1	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12.355.037,00	5.764.000,00	18.119.037,00				
1	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.609.000,00	49.709.536,00	161.318.536,00				
1	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.797.811.411,00	8.296.169.218,00	189.004.000.629,00				
1	01	01	202	01	Penyediaan Casp dan Tunjangan ASN	150.621.386.411,00	8.272.969.218,00	168.894.376.629,00				
1	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	86.425.000,00	23.200.000,00	109.625.000,00				
1	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.002.000,00	7.846.000,00	127.848.000,00				
1	01	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pegawai	120.002.000,00	7.846.000,00	127.848.000,00				
1	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.991.000,00	100.000.000,00	259.991.000,00				
1	01	01	206	09	Tetaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.991.000,00	100.000.000,00	259.991.000,00				
1	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	998.307.500,00	73.400.000,00	1.071.707.500,00				
1	01	01	208	02	Tetaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi: Sumber Daya Air dan Listrik Listrik	140.692.000,00	(56.000.000,00)	85.692.000,00				
1	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	214.610.000,00	14.980.000,00	229.620.000,00				
1	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.075.500,00	113.420.000,00	756.495.500,00				
1	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.800.000,00	116.400.000,00	271.200.000,00				
1	01	01	209	01	Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pajak Kendaraan	100.000.000,00	36.400.000,00	136.400.000,00				

1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 Kegiatan	54.800.000,00	80.000.000,00	134.800.000,00	DAU
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			47.372.088.788,00	1.388.038.630,00	48.738.124.418,00	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	19.092.110.008,00	1.789.837.047,00	20.881.647.055,00	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	15 Sekolah	2.737.757.508,00	397.809.217,00	3.135.566.725,00	DAU, DAK FISIK & DID
2	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapat peralatan TIK	9 Sekolah	1.224.800.000,00	98.050.000,00	1.322.850.000,00	DAK FISIK
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya Persentase jumlah Sekolah Penerima Bantuan Dana BOS	100%	15.045.450.000,00	1.270.077.830,00	16.315.527.830,00	DAK NON FISIK
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB	141 Sekolah	84.102.500,00	3.600.000,00	87.702.500,00	DAU
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	19.800.803.037,00	(674.097.617,00)	18.826.705.620,00	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer dan Pembangunan Laboratorium IPA	6 Ruang	3.300.613.000,00	(445.703.870,00)	2.854.909.130,00	DAK FISIK
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun	8 Sekolah	1.735.720.037,00	305.672.753,00	2.043.362.790,00	DAU, DAK FISIK & DID
2	01	02	2.03	20	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Sekolah yang menerima Alat Peraga dan Praktik Siswa	3 Sekolah	76.080.000,00	-	76.080.000,00	DAK FISIK
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima BOPDA dan Sekolah Penerima Dana BOS	1017 Orang & 52 Sekolah	14.271.700.000,00	(549.500.000,00)	13.722.100.000,00	DAK NON FISIK & DAU
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Ujian Nasional	1 Kegiatan	40.690.000,00	14.533.600,00	55.223.600,00	DAU
1	01	02	2.02	37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Persentase jumlah Siswa yang menerima Dana Program Indonesia Pintar	100%	25.000.000,00	-	25.000.000,00	DAU
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Sosialisasi Dana BOS	193 Sekolah	50.000.000,00	-	50.000.000,00	DAU
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100%	6.883.081.740,00	72.702.600,00	6.955.784.340,00	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	2 Lembaga	278.456.750,00	(134.000,00)	278.322.750,00	DAK FISIK & DAU
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	18 Lembaga	2.382.664.990,00	72.636.600,00	2.455.301.590,00	DAK FISIK, DAU & DID
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOP PAUD)	1 Kegiatan	4.139.770.000,00	-	4.139.770.000,00	DAK NON FISIK
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2 Lembaga	50.000.000,00	-	50.000.000,00	DAK FISIK
1	01	02	2.03	15	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 Kegiatan	32.190.000,00	-	32.190.000,00	DAU
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	1.896.094.000,00	197.893.500,00	2.093.987.500,00	
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang menerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	2 Lembaga	231.794.000,00	(6.895.500,00)	224.897.500,00	DAK FISIK
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal yang dibina	4 Lembaga	51.900.000,00	204.790.000,00	256.690.000,00	DAU
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang menerima Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Lembaga	1.512.400.000,00	-	1.512.400.000,00	DAK NON FISIK
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			84.000.000,00	-	84.000.000,00	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		100%	84.000.000,00	-	84.000.000,00	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Terusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	54.000.000,00	-	54.000.000,00	DAU

1	01	06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			37.424.500,00	30.000.000,00	67.424.500,00		
1	01	06	2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	37.424.500,00	30.000.000,00	67.424.500,00		
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konsensasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Vitalitas, Konsensasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah	1 Kegiatan	37.424.500,00	30.000.000,00	67.424.500,00	DAU & DID
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			84.720.000,00	32.001.000,00	116.721.000,00		
1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	84.720.000,00	32.001.000,00	116.721.000,00		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Sekolah Penggerak	193 Orang	84.720.000,00	32.001.000,00	116.721.000,00	DAU & DID
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA			4.457.432.000,00	(30.000.000,00)	4.427.432.000,00		
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN			180.000.000,00	(12.600.000,00)	167.600.000,00		
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100%	180.000.000,00	(12.600.000,00)	167.600.000,00		
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya seleksi, pelatihan dan penyelenggaraan pasukan pengibar bendera	100%	180.000.000,00	(12.500.000,00)	167.500.000,00	DAU
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			4.254.071.000,00	(17.600.000,00)	4.236.671.000,00		
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	450.000.000,00	-	450.000.000,00		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana olahraga disemua cabor	100%	450.000.000,00	-	450.000.000,00	DAU
2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	3.804.071.000,00	(17.600.000,00)	3.786.671.000,00		
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	10 Event	3.804.071.000,00	(17.600.000,00)	3.786.671.000,00	DAU & DID
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			33.362.000,00	-	33.362.000,00		
2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100%	33.362.000,00	-	33.362.000,00		
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	33.362.000,00	-	33.362.000,00	DAU
Total								234.337.875.983,00	10.068.864.383,00	244.406.740.366,00	

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Kepulauan Selayar kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan Bupati Kepulauan Selayar sebagai pemberi amanah dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sesuai sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya pada kinerja yang dihasilkan atau kegiatan yang dihasilkan di tahun 2022 tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan sebenarnya mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja juga menyangkut indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil – hasil kinerja utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dimana dalam setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode yang dapat dijadikan tolak ukur untuk pencapaian target tahun berikutnya.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 yang disepakati antara pemberi amanah dalam hal ini Bupati Kepulauan Selayar dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : MUH. BASLI ALI

Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,

DRS. MUSTAKIM, KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Berkualitas, Merata dan Terjangkau	a. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini	100%
		b. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	100%
		c. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan	100%
		d. Persentase Angka Partisipasi Sekolah	90%
2.	Meningkatnya Pemuda yang Berkarakter	a. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	50%
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	b. Jumlah Medali /Penghargaan di bidang Olahraga	10 Medali/ Penghargaan

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 182.289.129.698
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 47.405.168.785
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp 54.000.000
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp 37.424.500
5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 84.720.000
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 180.000.000
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 4.254.071.000
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 33.362.000
JUMLAH	Rp 234.337.875.983

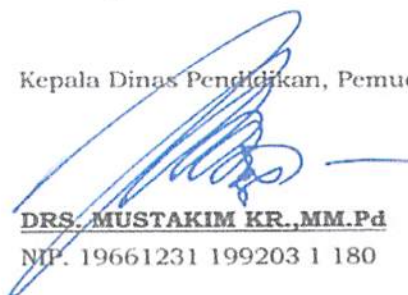
Benteng, 4 Januari 2022

Bupati,



H. MUH. BASLI ALI

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,



DRS. MUSTAKIM KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Andi Agus, MM

Jabatan : Plt. Sekertaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

*Selanjutnya disebut **pihak pertama**.*

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

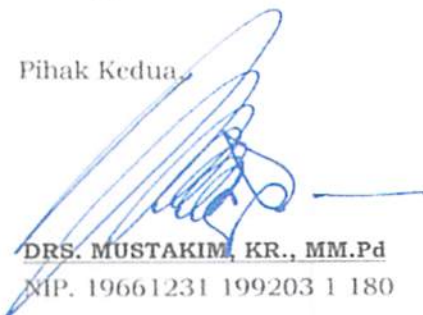
*Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

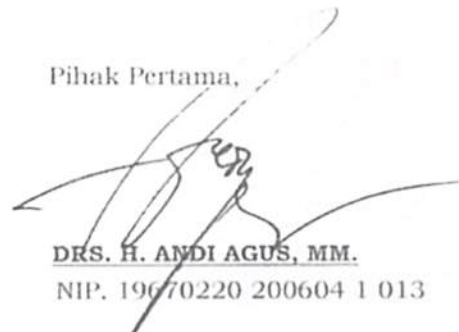
Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,



DRS. MUSTAKIM, KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,



DRS. H. ANDI AGUS, MM.
NIP. 19670220 200604 1 013

PROGRAM		:PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
SEKRETARIUS						
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022						
NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
A.	Pencapaian, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Januari s/d Desember	3 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Januari s/d Desember	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Januari s/d Desember	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Januari s/d Desember	3 Dokumen	Tersedianya evaluasi kinerja perangkat daerah	
B.	Administrasi keuangan perangkat daerah					
1.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Januari s/d Desember	1 ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	
2.	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	Januari s/d Desember	120 Kali	Tersedianya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	

DRS. MUSTAKIM, KR., MM, Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

DRS. H. ANDI AGUS, MM.
NIP. 19670220 200604 1 013

Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

C.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Januari s/d Desember	20 Dokumen	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
D.	Administrasi umum perangkat daerah	kepegawaian	Administrasi kepegawaian			
1.	Fenyelesaian laporan rapat koordinasi dan penyusunan laporan SKPD	koordinasi dan penyusunan laporan SKPD	jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan SKPD	Januari s/d Desember	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan SKPD
E.	Fenyelesaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
1.	Fenyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan Fenyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan Fenyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Januari s/d Desember	1 Kegiatan	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.	Fenyelesaian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan Fenyelesaian jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah laporan Fenyelesaian jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Januari s/d Desember	1 Kegiatan	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3.	Fenyelesaian jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan Fenyelesaian jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan Fenyelesaian jasa pelayanan umum kantor	Januari s/d Desember	1 Kegiatan	Terlaksananya Fenyelesaian jasa pelayanan umum kantor
F.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
1.	Fenyelesaian jasa pemeliharaan, biaya perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	jumlah kendaraan pemeliharaan, biaya perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	jumlah kendaraan pemeliharaan, biaya perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Januari s/d Desember	1 Kegiatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Januari s/d Desember	1 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Page 2



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Yani, S.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

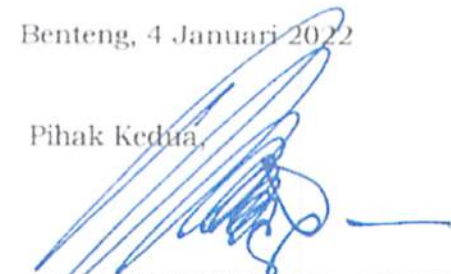
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,



DRS. MUSTAKIM, KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,



AKHMAD YANI, S.Pd
NIP. 19810308 200803 1 002

1.	Perencanaan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Januari s/d Desember	40.590.000	52 Satuan Pendidikan	Terceraiannya proses belajar dan ujian bagi peserta didik
2.	Perencanaan sarana, prasarana dan utilitas	Januari s/d Desember	2.382.664.990	18 Unit	Sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang terbangun
3.	Perencanaan biaya personal peserta didik PAUD	Januari s/d Desember	4.139.770.000		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personal peserta didik
4.	Perencanaan alat praktik dan praga siswa PAUD yang tersedia	Januari s/d Desember	50.000.000	14 sekolah	Jumlah alat praktik dan praga siswa PAUD yang tersedia
5.	Perencanaan Dana BOP PAUD	Januari s/d Desember	6.683.081.740		Jumlah pengalokasian dana BOP PAUD yang tersedia
6.	Perencanaan pengembangan sarana, prasarana dan utilitas kelas/ruang guru PAUD	Januari s/d Desember	278.496.750	2 Unit	Costing/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun
7.	Perencanaan kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Januari s/d Desember	50.000.000	193 Orang	Dana BOS SMP yang tersedia dengan baik
8.	Perencanaan pendididkan lanjutan setelah jenjang pendidikan pertama	Januari s/d Desember	25.000.000	52 Satuan Pendidikan	Sarana pendidikan setelah jenjang pendidikan pertama yang siap diterima dan dilaksanakan
9.	Perencanaan kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Januari s/d Desember	14.271.700.000	6.234 peserta didik	Biaya personal peserta didik setelah menengahi pertama yang diterima oleh peserta didik

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1.	Perencanaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Januari s/d Desember	2.737.757.508	16 unit	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun
2.	Perencanaan pengembangan sekolah yang tersedia	Jumlah pengembangan sekolah yang tersedia	Januari s/d Desember	1.324.800.000	30 paket	Perencanaan sekolah yang tersedia
3.	Perencanaan biaya personal peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personal peserta didik	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personal peserta didik	Januari s/d Desember	13.045.450.000	13.206 peserta didik	Biaya personal peserta didik sekolah dasar yang diterima oleh peserta didik
4.	Perencanaan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menengahi jenjang pendidikan pertama dan ujian proses belajar dan ujian	Januari s/d Desember	84.102.500	139 satuan pendidikan	Terceraiannya proses belajar dan ujian bagi peserta didik
5.	Perencanaan pengembangan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah pengembangan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	Januari s/d Desember	1.736.720.037	8 Unit	Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun
6.	Perencanaan pengembangan sarana, prasarana dan utilitas kelas/ruang guru PAUD	Jumlah pengembangan sarana, prasarana dan utilitas kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun	Januari s/d Desember	278.496.750	2 Unit	Costing/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah dibangun
7.	Perencanaan kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Jumlah kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Januari s/d Desember	50.000.000	193 Orang	Dana BOS SMP yang tersedia dengan baik
8.	Perencanaan pendididkan lanjutan setelah jenjang pendidikan pertama	Jumlah satuan pendidikan lanjutan setelah jenjang pendidikan pertama yang siap diterima dan dilaksanakan	Januari s/d Desember	25.000.000	52 Satuan Pendidikan	Sarana pendidikan setelah jenjang pendidikan pertama yang siap diterima dan dilaksanakan
9.	Perencanaan kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Jumlah kapasitas pengalokasian BOS dalam menengahi SMP	Januari s/d Desember	14.271.700.000	6.234 peserta didik	Biaya personal peserta didik setelah menengahi pertama yang diterima oleh peserta didik

PERALIHAN KEMERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PROGRAM : PENDEKATAN PENDIDIKAN

2.	Pertemuan kebidanan dan manajemen sekolah nonformal/kesteraan yang nonformal/kesteraan	Jumlah sekolah dan manajemen kebidanan dan manajemen nonformal/kesteraan	Laporan s/d Desember	21.000.000	+ berbagai	Jumlah sekolah nonformal/kesteraan yang diajarkan
3.	Pengabdian dan HRP sekolah nonformal/kesteraan dalam pengabdian dan HRP nonformal/kesteraan	jumlah tenaga yang mengajar kesteraan nonformal/kesteraan	Laporan s/d Desember	1.612.400.000	+ berbagai	Jumlah sekolah nonformal/kesteraan yang diajarkan dan HRP nya

KADIS
 DINAS PENDIDIKAN, PENGUDA DAN OLAHRAGA,
 Drs. MUBTAKHIR, M.Pd
 NIP. 196612011992031188

KABID
 BAPALD BLOK PENGUKUHAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK
 USA DIRI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL,
 ARIYAD YANI, S.Pd
 NIP. 198103082008031002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dampak, S.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

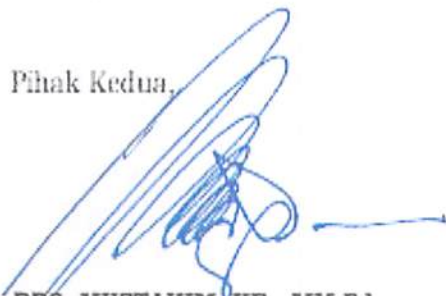
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,



DRS. MUSTAKIM, KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,



DEMPAK, S.Pd
NIP. 19690921 199203 1 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM : PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan					
1.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Januari s/d Desember	84.720.000	1 (satu) Dokumen	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Januari s/d Desember	-	1 (satu) Laporan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,



DRS. MUSTAKIM, KR., MM.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,



DEMPAK, S.Pd
NIP. 19690921 199203 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Patta Aris, S.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,


Drs. MUSTAKIM KR, MM. Pd

NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,


PATTA ARIS, S. Pd

NIP.19660206 199103 1 015

PERANJAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHASA DAN SASTRA

PROGRAM : PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

NO	SUB SEGIAN	INDIKATOR	MANTU PELAYANAN	MASUKAN	HASIL
1.	Pembinaan, Perhadangan Bahasa dan Sastra yang Penuntutannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terakui, terlembaga, terkonstruksi dan terhablasi	Januari s/d Desember	37.424.500	1 Bahasa
					Bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten/kota yang terakui terlembaga, terkonstruksi dan terhablasi

Beneng, 4 Januari 2022

KABUD
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHASA DAN SASTRA
PARTI ARIS, S. Pd
NIP. 19660206 199103 1 015

KADIS
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DRS. MUSTAKIM, M.Pd
NIP. 19661231 199203 1 180



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Fatmawati No. 9 Benteng, 92812 Sulawesi Selatan
Telp (0414) 21199, Faximile (0414) 21199

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Basir, S. Sos

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Mustakim KR, MM.Pd

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

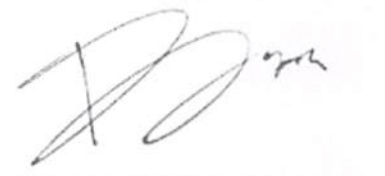
Benteng, 4 Januari 2022

Pihak Kedua,



Drs. MUSTAKIM KR, MM. Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

Pihak Pertama,



MUHAMMAD BASIR, S.Sos
NIP. 19640318 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1.	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah pemuda kader kabupaten kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	April s/d agustus	180.000.000	75 Orang	Terselenggaranya seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

Bontong, 4 Januari 2022

KADIS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,


Drs. MUSTAKIM H.R., MM Pd
NIP. 19661231 199203 1 180

KABID
PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,


MUHAMMAD BASIR, S.SOS
NIP. 19640318 199401 1 001



A. Pengukuran Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan melainkan melaksanakan tupoksi untuk mencapai target/indikator yang telah ditetapkan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan skala peringkat kinerja Skala Ketercapaian Target sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100	SANGAT MEMUASKAN
2	90 – 100	MEMUASKAN
3	60 – 90	CUKUP MEMUASKAN
4	25 – 60	KURANG MEMUASKAN
5	0 – 25	TIDAK MEMUASKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2026 sebanyak 26 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 1 indikator
 - Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 5 indikator
 - Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 8 indikator
 - Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 4 indikator
 - Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator
- Dari 10 IKU tersebut, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 10 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 90 persen telah memenuhi kriteria memuaskan.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian 2022
1	3	4	5	6
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) :			
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	88,46
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	100	65,50
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100	78,74
	Indeks Pendidikan	%	52,55	80,75
4	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	86,66	100,40
5	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	118	98,22
6	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	118	79,96
7	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	100
8	APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD/RA	%	100	88,46
9	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	99	73,65
10	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	92,12	57,36
11	AP (Angka Putus Sekolah) SD/MI	%	0,05	0,74

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Target	Capaian 2022
1	3	4	5	6
12	AP (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs	%	0,00	2,12
13	AL (Angka Kelulusan) SD/MI	%	100	100
14	AL (Angka Kelulusan) SMP/MTs	%	100	100
15	AM (Angka Melanjutkan) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	97,83
16	Fasilitas Pendidikan :			
	a. Bangunan SD kondisi baik	%	100	30,41
	b. Bangunan SMP kondisi baik	%	100	43,25
17	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD	Rasio	1:93	1:85
18	Rasio Guru/Mund/Kelas Rata-Rata TK	Rasio	1:10	1:8
19	Rasio Guru/Mund/Kelas Rata-Rata SD	Rasio	1:20	1:12
20	Rasio Guru/Mund/Kelas Rata-Rata SMP	Rasio	1:20	1:13
21	Guru yang memenuhi kualifikasi D/MS1	%	55	79,30
	Keperumudaan dan Olahraga			
22	Jumlah Organisasi Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Organisasi Pemuda	35	42
23	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Organisasi Olahraga	26	13
24	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti	Kegiatan	6	6
25	Jumlah Penghargaan Olahraga yang diperoleh	Medali	10	17
26	Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan	Kegiatan	2	2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR OR KINERJA SASARAN	AKSI / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					K	RP	K	RP		
1	Meningkatnya Kepercaaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Meningkat nya Nilai SAKIP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen 3	26.138.000 RP	Dokumen 3	26.138.000 RP	100	Subag Program
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen 1	12.714.750 RP	Dokumen 1	12.714.750 RP	100	Subag Program
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen 2	18.119.037 RP	Dokumen 2	18.119.037 RP	100	Subag Program
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen 2	161.318.535 RP	Dokumen 2	161.316.135 RP	100	Subag Program

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	188.894.375.629	12 Bulan	182.841.039.947	100	97	Subag Keuangan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	109.625.000	12 Bulan	109.344.500	100	100	Subag Keuangan
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	127.848.000	2 Laporan	127.848.000	100	100	Subag Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	299.991.000	12 Bulan	299.436.000	100	100	Subag Keuangan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Kegiatan	85.592.000	1 Kegiatan	84.320.695	100	99	Subag Keuangan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	229.620.000	1 Kegiatan	229.605.000	100	100	Subag Keuangan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	756.495.500	1 Kegiatan	731.715.314	100	97	Subag Keuangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	136.400.000	1 Kegiatan	136.139.040	100	100	Subag Keuangan

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	134.800.000,00	1 Kegiatan	134.797.050	100	100	Subag Keuangan
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A - APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI - AP (Angka Putus Sekolah) SD/MI - AL (Angka Kelulusan) SD/MI - Angka Pendidikan yang Ditamatkan - Bangunan SD Kondisi Baik - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD 	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15 Sekolah	3.135.566.725,00	15 Sekolah	2.877.208.717	100	92	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9 Sekolah	1.322.850.000	9 Sekolah	1.322.850.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100%	16.315.527.830,00	100%	16.315.527.830	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	141 Sekolah	87.702.500	141 Sekolah	69.977.500	100	80	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		- APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/ Paket B-APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs-AP (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs-AL (Angka Kelulusan) SMP/MTs-Angka Pendidikan yang Ditamatkan-Bangunan SMP Kondisi Baik- Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SMP	Pembangunan Laboratorium	6 Ruang	2.854.909.130	6 Ruang	2.851.684.130	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 Sekolah	2.043.392.790,00	8 Sekolah	1.886.699.253	100	92	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	3 Sekolah	76.080.000,00	3 Sekolah	76.080.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1017 Orang & 52 Sekolah	13.722.100.000,00	1017 Orang & 52 Sekolah	13.722.100.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	55.223.600,00	1 Kegiatan	53.348,600	100	97	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	25.000.000,00	100%	23.650,000	100	95	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	193 Sekolah	50.000.000,00	193 Sekolah	50.000,000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Lembaga	278.322.750,00	2 Lembaga	193.606,000	100	70	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	18 Lembaga	2.455.501.590,00	18 Lembaga	2.382.218.525	100	97	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1 Kegiatan	4.139.770.000,00	1 Kegiatan	4.139.770.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2 Lembaga	50.000.000,00	2 Lembaga	50.000.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	1 Kegiatan	32.190.000,00	1 Kegiatan	32.190.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

			APK (Angka Partisipasi Kasar) Pendidikan Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Lembaga	224.897.500,00	2 Lembaga	224.897.500	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Lembaga	256.690.000,00	4 Lembaga	255.800.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4 Lembaga	1.612.400.000,00	4 Lembaga	1.612.400.000	100	100	Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1 Dokumen	54.000.000,00	1 Dokumen	48.500.000	100	90	Kepala Bidang Kurikulum, Bahasa dan Sastra
				Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	67.424.500,00	1 Kegiatan	67.424,500	100	100	Kepala Bidang Kurikulum, Bahasa dan Sastra

3	Meratanya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD - Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata TK - Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SD - Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SMP - Guru yang memenuhi kualifikasi DIV/S1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	193 Sekolah	116.721.000,00	193 Sekolah	116.721.000	100	100	Kepala Bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	100%	167.500.000,00	100%	167.430.000	100	100	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	33.362.000,00	1 Kegiatan	32.012.000	100	96	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	- Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan - Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti - Jumlah Penghargaan Olahraga yang diperoleh	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100%	450.000.000,00	100%	249.649.000	100	55	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	10 Event	3.786.571.000,00	10 Event	3.786.000.000	100	100	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

B. Analisis Capaian Kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pendidikan dan urusan wajib Non Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Adapun tabel indikator kinerja kunci Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA KUNCI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

No.	Indikator	Satuan	2022	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	65,5
2	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	78,74
3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	88,46
4	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100	100
5	Persentase Satuan Pendidikan Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Rombel dan Standar Kurikulum	%	100	100

6	Persentase Jumlah lembaga/satuan pendidikan terdaftar yang diselenggarakan oleh masyarakat	%	100	100
7	Persentase Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Daerah	%	100	100
8	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	4,2	4,2
9	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	40	40
10	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dikembangkan kapasitas dan daya saingnya	%	4,06	4,06

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	S-4 -Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat S-4 -Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	%	100	78,00	78,00
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	88,46	88,46
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	100	65,50	65,50
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100	78,74	78,74
		Indeks Pendidikan	%	52,55	80,75	80,75
		APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	%	86,66	100,40	115,5
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	118	98,22	83,23
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	118	79,96	67,76
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	100	100
		APM (Angka	%	100	88,46	88,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi 2022	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1		Partisipasi Murni) PAUD/RA				
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	%	99	73,65	73,65
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	%	92,12	57,36	57,36
		AP (Angka Putus Sekolah) SD/MI	%	0,05	0,74	1,480
		AP (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs	%	0,00	2,12	2,12
		AL (Angka Kelulusan) SD/MI	%	100	100	100
		AL (Angka Kelulusan) SMP/MTs	%	100	100	100
		AM (Angka Melanjutkan) SD/MI ke SMP/MTS	%	100	97,83	97,83
		Fasilitas Pendidikan :				
		c. Bangunan SD kondisi baik	%	100	30,41	30,41
		d. Bangunan SMP kondisi baik	%	100	43,25	43,25
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD	%	1:93	1:85	1:91
2	Meratanya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata TK	Rasio	1:10	1:8	1:80
		Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SD	Rasio	1:20	1:12	1:60
		Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SMP	Rasio	1:20	1:13	1:65
		Guru yang memenuhi kualifikasi DIV/S1	%	55	79,30	144,18
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga				
		Jumlah Organisasi Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Organisasi Pemuda	35	42	120
		Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	Organisasi Olahraga	26	13	50
		Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti	Kegiatan	6	6	100

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	4	5	6
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) :			
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,97	99,60	88,46
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	78,33	82,44	65,50
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	89,86	80,25	78,74
	Indeks Pendidikan :	50,92	50,92	80,76
4	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	98,42	99,60	100,40
5	APK (Angka Partisipasi Kasar) SDMI/Paket A	98,12	114	98,22
6	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	98	75,35	79,96
	Angka Pendidikan yang ditamatkan	100	100	100
	APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD/RA	90	99,60	88,46
	APM (Angka Partisipasi Murni) SDMI	97,22	100,60	73,65
	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs	91	60,98	57,36
	AP (Angka Putus Sekolah) SDMI	0,47	0,67	0,74
	AP (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs	0,87	1,82	2,12
	AL (Angka Kelulusan) SDMI	100	100	100
	AL (Angka Kelulusan) SMP/MTs	100	100	100
	AM (Angka Melanjutkan) SD/MI ke SMP/MTs	99,01	85,67	97,83
	Fasilitas Pendidikan :			
	a. Bangunan SD kondisi baik	88	30,41	30,41

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi 2022	Persentase Capaian	
						3	4
1	2	3	4	5	6	7	
		Jumlah Penghargaan Olahraga yang diperoleh	Medali	10	17	170	
		Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan	Kegiatan	2	2	100	

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	4	5	6
	b. Bangunan SMP kondisi baik	85	43,25	43,25
	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata TK	1:6:1	1:6:1	1:85
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD	1:6	1:7	1:8
	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SD	1:8:1	1:95:1	1:12
	Rasio Guru/Murid/Kelas Rata-Rata SMP	1:6:1	1:6:1	1:13
	Guru yang memenuhi kualifikasi DIV/S1	81,60	93,22	79,30
	Kepemudaan dan Olahraga			
	Jumlah Organisasi Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	50	50	42
	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan	97	97	13
	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti	5	5	6
	Jumlah Penghargaan Olahraga yang diperoleh	5	5	17
	Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan	2	2	2

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam tabel diatas. Penyajian uraian capaian ini disajikan per sasaran strategis.

ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun berbanding jumlah penduduk usia penduduk yang pernah/sedang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu di kali 100%. Angka Putus Sekolah pada Jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2022 berdasarkan data sekolah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang

pendidikan SD/MI adalah 99 orang anak. Sementara jumlah siswa di tingkat pendidikan SD/MI adalah 14.072 siswa. Sehingga angka putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI adalah 0.74 %. Sedangkan Angka Putus Sekolah pada Jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2022 berdasarkan data sekolah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten kepulauan Selayar jumlah siswa yang putus sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 126 orang anak. Sementara jumlah siswa di tingkat pendidikan SMP/MTs adalah 6.556 siswa. Sehingga angka putus Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 2,12% hal tersebut timbul dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya :

- a. Karena sakit yang diderita yang tidak akan tahu kapan sembuhnya, sakit yang diderita siswa tersebut terlalu lama dan menyebabkan siswa tertinggal banyak pelajaran yang diajarkan oleh guru disekolah, maka keputusan yang dipilih siswa atau orang tua tersebut memilih tidak bersekolah lagi melihat temen teman seumuranya yang sudah hampir menyelesaikan Sekolah.
- b. Siswa yang terpaksa untuk bekerja demi menyambung hidup keluarga. Keterpaksaan siswa untuk bekerja dalam hal ini menyebabkan siswa tidak fokus pada sekolah saja, melainkan bercabang untuk sekolah dan bekerja. Alhasil yang didapatkan adalah kelelahan fisik yang dikeluarkan siswa untuk bekerja tidak dapat dibagi dengan kegiatan sekolah, hal ini menjadikan pada saat di sekolah siswa menjadi tidak konsentrasi dalam menyerap pembelajaran yang di berikan oleh guru.
- c. Faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, yaitu keinginan siswa itu sendiri yang ingin putus sekolah atau tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya dan keterbatasan atau kurangnya orangtua dalam memberikan motivasi serta dukungan pendidikan kepada siswa juga dialami oleh masing – masing orang tua yang siswanya mengalami putus sekolah.

Dari faktor diatas yang menyebabkan adanya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat diperlukan adanya Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Mensukseskan Pendidikan, meskipun pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia dinilai sukses, namun jumlah anak usia wajib belajar yang

hanya sampai SD cukup besar. Ini menjadi pekerjaan semua pihak agar pendidikan semakin merata dan mensejahterakan. Mulai dari pemerintah, kalangan swasta dan semua lapisan masyarakat.

Masa depan di luar pendidikan sekolah dan tak kalah pentingnya ke depan, pemerintah juga mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas guru agar peserta didik semakin nyaman dan bersemangat untuk bersekolah. Orang bersekolah bertujuan agar mampu berpikir, menalar secara rasional obyektif, dan bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Untuk itu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan ditopang dengan tenaga pengajar yang bersahabat. Dan, di sini Pemerintah melalui Dinas Pendidikan bisa berperan dengan optimal.

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan berbanding jumlah penduduk di usia pendidikan jenjang tersebut, dikali 100%. Penghitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) masing-masing Jenjang Pendidikan menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang bersumber dari DISDUKCAPIL.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Berdasarkan data DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 5-6 tahun adalah 4.273 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan PAUD adalah 4.288 siswa. Sehingga APK PAUD pada tahun 2022 adalah 100,40 % . Hal tersebut memenuhi target dikarenakan tingginya kesadaran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD) terutama untuk Ibu yang tidak bekerja.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Berdasarkan data DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 7-12 tahun adalah 14.327 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan SD/MI adalah 14.072 siswa. Sehingga APK SD/MI pada tahun 2022 adalah 98,22 % . Target realisasi belum mencapai 100% dikarenakan beberapa faktor, antara lain : mutasi orang tua siswa sehingga siswa juga ikut

mutasi ke luar daerah dan siswa yang ingin bersekolah di luar Kabupaten Kepulauan Selayar.

c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Berdasarkan data DISDUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah 8.199 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan SD/MI adalah 6.556 siswa sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar 79,96 %. Pencapaian realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs masih belum mencapai 100 % karena beberapa faktor, antara lain mutasi siswa dari dalam daerah yang ingin bersekolah di luar daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan adapun faktor lain yang menyebabkan pencapaian tidak sesuai target adalah adanya angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menaikkan angka partisipasi Kasar (APK) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa yang berada di usia pendidikan berbanding jumlah penduduk yang berada di usia pendidikan dikali 100%. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

a. Angka Partisipasi Murni TK/RA

Berdasarkan data DISDUKCAPUL di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 4.273 jiwa. Sementara jumlah siswa berusia 5-6 tahun di jenjang pendidikan TK/RA adalah 3.780 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar 88,46 % . Realisasi capaian belum mencapai 100% di

sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: mutasi orang tua siswa ke luar daerah dan tumbuhnya Paud, tidak diiringi dengan aturan yang ketat tentang pembatasan umur seorang anak untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Paud tanpa menyadari bahwa anaknya belum berada di usia pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Berdasarkan data DISDUKCAPUL di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 14.327 jiwa. Sementara jumlah siswa berusia 7-12 tahun di jenjang pendidikan SD/MI adalah 10.553 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar 73,65% . Realisasi capaian belum mencapai 100% disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: mutasi orang tua siswa ke luar daerah dan tumbuhnya Paud, tidak diiringi dengan aturan yang ketat tentang pembatasan umur seorang anak untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di Paud tanpa menyadari bahwa anaknya belum berada di usia pendidikan. Sehingga setelah anak mengikuti pendidikan, timbul rasa jenuh di pendidikan Paud itu. Akhirnya orang tua anak memaksakan anaknya untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi (SD), walaupun usia anak belum mencapai 7 tahun. Hal ini menyebabkan APM SD/MI tentunya tidak akan mencapai target.

c. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

Berdasarkan data DISDUKCAPUL di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 8.199 orang. Sementara jumlah siswa berusia 13-15 tahun di jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 4.703 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar 57,36%. Realisasi tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : mutasi orang tua siswa ke luar daerah serta usia siswa yang memang dirasa yang mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi (SMP) yang belum mencapai usia 13-15 tahun oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi mengenai APM ini kepada masyarakat.

iii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Langkah langkah dilakukan dalam pencapaian sasaran **Peningkatan Akses dan kualitas Layanan pendidikan** yaitu dengan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan sasaran strategis yang ingin dicapai, Beberapa program yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Walaupun sudah banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah untuk mencapai target sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun beberapa indikator masih belum dapat memenuhi target, dan hal yang harus dilakukan yaitu mengevaluasi penyebab ketidakberhasilan sasaran mencapai target yang ditetapkan dan mengambil langkah terobosan di tahun berikutnya agar target yang diharapkan dapat tercapai.

iv. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Alokasi Anggaran untuk pencapaian sasaran **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2022** sebesar Rp. 239.969.307.366,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 233.285.187.023,- atau terealisasi sebesar 97 persen. Dengan rata-rata capaian kinerja menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien dengan hasil yang dicapai.

v. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan pendidikan** ini adalah sebanyak 5 program.

C. Realisasi Keuangan

Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, Dinas Pendidikan dialokasikan sebesar **Rp.244.406.740.366,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.237.270.629.023** atau **97,08%**.

Adapun Realisasi Anggaran per program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NAMA PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TERTIMBANG	
		KEUANGAN	
		Rp.	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	244.406.740.366	237.270.629.023	97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	239.969.307.366	233.285.187.023	97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.993.037.451	184.912.533.468	97
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.290.322	218.287.922	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.138.000	26.138.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.714.750	12.714.750	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18.119.037	18.119.037	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.318.535	161.316.135	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.004.000.629	182.950.384.447	96,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	188.894.375.629	182.841.039.947	96,80
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.625.000	109.344.500	99,74

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.848.000	127.848.000	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pegawai	127.848.000	127.848.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.991.000	299.436.000	99,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.991.000	299.436.000	99,81
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.071.707.500	1.045.641.009	97,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.592.000	84.320.695	98,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.620.000	229.605.000	99,99
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.495.500	731.715.314	96,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.200.000	270.936.090	99,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.400.000	136.139.040	99,81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.800.000	134.797.050	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	48.738.124.415	48.140.008.055	98,77
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.861.647.055	20.585.564.047	98,68
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.135.566.725	2.877.208.717	91,76
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.322.850.000	1.322.850.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	16.315.527.830	16.315.527.830	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	87.702.500	69.977.500	79,79
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.826.705.520	18.663.561.983	99,13
Pembangunan Laboratorium	2.854.909.130	2.851.684.130	99,89
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.043.392.790	1.886.699.253	92,33
Pengadaan Perlengkapan Siswa	76.080.000	76.080.000	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13.722.100.000	13.722.100.000	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	55.223.600	53.348.600	96,60
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.000.000	23.650.000	94,60
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	100,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.955.784.340	6.797.784.525	97,73

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	278.322.750	193.606.000	69,56
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.455.501.590	2.382.218.525	97,02
penyediaan biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.139.770.000	4.139.770.000	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000	50.000.000	100,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.190.000	32.190.000	100,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.093.987.500	2.093.097.500	99,96
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	224.897.500	224.897.500	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	256.690.000	255.800.000	99,65
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.612.400.000	1.612.400.000	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	54.000.000	48.500.000	89,81
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	54.000.000	48.500.000	89,81
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	54.000.000	48.500.000	89,81
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	67.424.500	67.424.500	100,00
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.424.500	67.424.500	100,00
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	67.424.500	67.424.500	100,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	116.721.000	116.721.000	100,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	116.721.000	116.721.000	100,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	116.721.000	116.721.000	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.437.433.000	3.985.442.000	89,81
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	167.500.000	167.430.000	99,96
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda	167.500.000	167.430.000	99,96

TOTAL			
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	167.500.000	167.430.000	99,96
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS			
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.236.571.000	3.786.000.000	89,36
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	249.649.000	55,48
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	450.000.000	249.649.000	55,48
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.786.571.000	3.786.000.000	99,98
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3.786.571.000	3.786.000.000	99,98
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	33.362.000	32.012.000	95,95
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	33.362.000	32.012.000	95,95
Pencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	33.362.000	32.012.000	95,95
TOTAL	244.406.740,566	237.270.629,023	97,08



LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat menggambarkan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi.

Selama tahun 2022, berbagai prestasi dan keberhasilan telah menjadikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Selayar selangkah lebih maju. Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan angka hasil pengukuran kinerja dengan segala data pendukungnya. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan koordinasi serta inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada yang tidak tercapai 100%.

Meskipun sebagian besar capaian indikator telah memenuhi bahkan melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Selayar. Di samping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Selayar 2022 – 2026.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Selayar untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Selayar telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan.